



DESIL WARGA

DPRD Jogja Minta Pemutakhiran Data

JOGJA—Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja RM. Sinarbiyat Nujanat menyoroti ketidaktepatan data desil yang menjadi dasar penyaluran sejumlah bantuan sosial. Ia meminta Pemerintah Pusat segera melakukan pemutakhiran karena masih ditemukan warga miskin yang justru keluar dari daftar penerima bantuan.

Sinarbiyat mengatakan keluhan mengenai perubahan data desil banyak diterimanya saat turun ke lapangan. Salah satu persoalan yang ditemukan ialah warga yang sebelumnya masuk desil 2, tetapi dalam pemutakhiran terbaru justru berubah menjadi desil 9.

"Menurut saya pendataan desil ini perlu di-update ulang karena di lapangan banyak terjadi data-data yang tidak tepat sasaran. Ada yang di lapangan desil 2, tetapi tiba-tiba pada pemutakhiran data terakhir menjadi desil 9," katanya, Kamis (27/8).

Persoalan ketidaktepatan data tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekecewaan di masyarakat.

Sejumlah warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras untuk masyarakat miskin kini tidak lagi menerima bantuan.

"Kalau kami cermati di lapangan, saya kira sangat banyak yang sekarang sudah tidak mendapatkan PKH, tidak mendapatkan Raskin. Padahal sebelumnya mendapatkan, sementara kondisi ekonominya memang masih layak untuk mendapatkan program-program itu," ujarnya.

Sinarbiyat menilai pemutakhiran data perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat agar bantuan sosial kembali diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Ketepatan data menjadi penting agar program perlindungan sosial tidak justru membuat masyarakat miskin kehilangan akses bantuan.

Di sisi lain, Sinarbiyat meminta Pemkot Jogja menyiapkan

langkah antisipasi bagi warga miskin yang tidak masuk dalam kelompok desil 1 hingga 3, tetapi secara faktual masih memiliki keterbatasan ekonomi.

Menurut dia, Pemkot Jogja dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan bantuan sementara bagi masyarakat yang terdampak perubahan data hingga pemutakhiran data Pemerintah Pusat selesai dilakukan.

"Pemerintah kota mestinya juga harus mengantisipasi bagaimana mempersiapkan rencana aksi. Contoh terkait Raskin, seberapa besar kalau yang tidak mendapatkan bantuan Raskin lagi kemudian di-cover oleh APBD kota. Saya kira tidak terlalu besar anggaran yang harus dikeluarkan kota sebelum pemutakhiran ulang dilaksanakan pemerintah pusat," katanya.

Sinarbiyat mengatakan selama ini Pemkot Jogja lebih banyak memfokuskan bantuan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, aspek bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak terakomodasi dalam data desil juga perlu diperhatikan.

Ia mendorong Pemkot Jogja memiliki basis data masyarakat miskin di tingkat kota sebagai data pendamping di luar data Pemerintah Pusat yang dikelola melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pemkot Jogja perlu melakukan data-data tersendiri, di luar data yang oleh pemerintah pusat melalui BPS. Jadi satu pintu, satu atap," katanya.

Menurutnya, basis data tersebut dapat digunakan untuk memastikan masyarakat yang secara faktual masih berada dalam kondisi miskin, tetapi tidak tercatat dalam desil, tetap mendapatkan perlindungan.

Dengan langkah tersebut, kebutuhan pokok masyarakat miskin diharapkan tetap terjamin sembari menunggu pembaruan data nasional. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005